



AGRIBUSINESS SERIES 2017

MENUJU
AGRIBISNIS
INDONESIA
YANG BERDAYA SAING



DEPARTEMEN AGRIBISNIS
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor



Agribusiness Series 2017

Menuju
AGRIBISNIS INDONESIA
yang Berdaya Saing

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang No. 19 tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suara ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hal terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) satu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Agribusiness Series 2017

Menuju
AGRIBISNIS INDONESIA
yang Berdaya Saing

Editor

BAYU KRISNAMURTHI

HARIANTO



Agribusiness Series 2017

Menuju Agribisnis Indonesia yang Berdaya Saing

Tim Penulis :

- Ach Firman Wahyudi
- Ahmad Syariful Jamil
- Ahmad Zainuddin
- Amzul Rifin
- Anisa Dwi Utami
- Anna Fariyanti
- Bayu Krisnamurthi
- Chairani Putri Pratiwi
- Dwi Rachmina
- Feryanto
- Harianto
- Leo Rio Ependi Malau
- Lukman M. Baga
- Netti Tinaprilla
- Ratna Winandi Asmarantaka
- Rita Nurmalina
- Suharno
- Tintin Sarianti
- Triana Gita Dewi
- Tursina Andita Putri
- Yanti Nuraeni Muflikh

Editor :

- Bayu Krisnamurthi
- Harianto

Kata Pengantar : **Dwi Rachmina (Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB)**

Editor Bahasa :

- Netti Tinaprilla
- Ach. Firman Wahyudi

Desain sampul dan tata letak isi : **Hamid Jamaludin Muhrim**

Diterbitkan oleh :

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga – Bogor 16680

Dicetak oleh :

Raffi Offset, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku ini

tanpa izin tertulis dari Penerbit

Copyright © 2017 Departemen Agribisnis, FEM-IPB

ISBN : 978-602-14623-5-5

KATA PENGANTAR

DEPARTEMEN AGRIBISNIS FEM IPB

Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku “Agribisnis Series 2017: Menuju Agribisnis Indonesia yang Berdaya Saing” ini. Buku yang merupakan kristalisasi pemikiran para dosen di Departemen Agribisnis ini merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban akademik yang berlandaskan pada Mandat yang diberikan oleh Institut Pertanian Bogor, yakni dalam ”Pengembangan ilmu dan wawasan bisnis bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui pendekatan sistem dan kewirausahaan”.

Terbitnya buku ini dimaksudkan untuk memperkaya keilmuan dan teknologi serta wawasan agribisnis tropika yang dikembangkan oleh Departemen Agribisnis sekaligus menjadi kado bagi Institut Pertanian Bogor yang sedang merayakan Dies Natalis-nya yang ke-54. Departemen Agribisnis berkomitmen penuh untuk menerbitkan buku ”Agribisnis Series” secara periodik, sejalan dengan Visi Departemen Agribisnis, yaitu ”Menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan dalam pengembangan IPTEKS dan wawasan agribisnis tropika melalui pendekatan sistem dan kewirausahaan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Salah satu Misi Departemen Agribisnis adalah mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan bisnis dan kewirausahaan serta memasyarakatkan konsep dan teknologi agribisnis dengan sarannya antara lain adalah meningkatkan jumlah publikasi dosen dan membangun budaya akademis yang bertanggung-jawab. Oleh

karena itu, buku “Agribisnis Series” ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari mandat, visi, dan misi Departemen Agribisnis.

Buku “Agribisnis Series” ini bisa terbit atas dukungan dari para pemangku kepentingan Departemen Agribisnis, baik ditingkat Departemen, Fakultas, maupun Institut, maka dari itu Departemen Agribisnis sangat mengapresiasi. Apresiasi positif dan penghargaan, Departemen haturkan kepada tim kecil yang dikomandoi oleh **Dr. Harianto** dan secara khusus kepada **Dr. Bayu Krisnamurthi** atas lontaran ide membuat buku ini dan yang selalu memberikan “tantangan menuliskan” pikiran-pikiran para dosen di Departemen Agribisnis.

Kepada seluruh penulis buku “Agribisnis Series 2017” ini, Departemen Agribisnis menyampaikan penghargaan dan teruskan berkarya, “jadikan buku ini sebagai awal dari perjalanan pemikiran akademis”. Semoga buku ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat agribisnis dan buku “Agribisnis Series” berikutnya layak untuk ditunggu, selamat membaca.

Bogor, September 2017
Ketua Departemen Agribisnis
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPB

Dr. Dwi Rachmina

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Menuju Agribisnis di Indonesia yang Berdaya Saing (Suatu Pengantar) <i>Hariato, dan Bayu Krisnamurthi</i>	1
Berpikir Sistem (<i>System Thinking</i>) dalam Pendekatan Sistem (<i>System Approach</i>) <i>Rita Nurmalina</i>	15
Tinjauan Teoritis Risiko Produksi dan Harga dalam Model Ekonomi Rumah tangga Pertanian <i>Anna Fariyanti</i>	25
Efisiensi Teknis Usahatani Kedelai <i>Dwi Rachmina, dan Tursina Andita Putri</i>	39
Peran Koperasi Susu dalam Peningkatan Efisiensi Teknis Usahaternak Sapi Perah <i>Leo Rio Ependi Malau, Ratna Winandi Asmarantaka, dan Subarno</i>	53
Analisis Perbandingan Peranan <i>Input</i> terhadap Produksi pada Perkebunan Rakyat Karet dan Kelapa Sawit <i>Triana Gita Dewi, Rita Nurmalina, dan Amzul Rifin</i>	71
Potensi Agribisnis Florikultura di Indonesia <i>Netti Tinaprilla, dan Chairani Putri Pratini</i>	89
Analisis Produksi dan Konsumsi Komoditas Pangan Strategis di Indonesia <i>Netti Tinaprilla</i>	107

Analisis Ekonomi Rumah tangga Petani Kopi <i>Ratna Winandi Asmarantaka, Ahmad Syariful Jamil, dan Ahmad Zainuddin</i>	133
<i>Willingness To Pay</i> dan <i>Ability To Pay</i> Petani dalam Asuransi Pertanian <i>Anna Fariyanti, Tintin Sarianti, dan Yanti Nuraeni Muflikh</i>	153
Evolusi Elastisitas Permintaan Beras dan Implikasinya Bagi Kebijakan Publik Perberasan: Suatu Pemikiran Awal <i>Harianto</i>	163
Apakah Penerapan Bea Keluar Efektif? (Kasus Minyak Sawit dan Biji Kakao) <i>Amzul Rifin</i>	181
Efektifkah Subsidi Pupuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Petani Tanaman Pangan di Indonesia? <i>Feryanto</i>	189
Kajian Pemasaran Kopi di Provinsi Lampung <i>Ratna Winandi Asmarantaka, Netti Tinaprilla, dan Amzul Rifin</i>	205
Daya Saing Lada Indonesia di Pasar Dunia <i>Ach Firman Wahyudi, Anisa Dwi Utami, dan Lukman M. Baga</i>	219
Pertanian Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) <i>Feryanto</i>	241
Indikator Operasional Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Negara Berkembang <i>Rita Nurmalina</i>	251

APAKAH PENERAPAN BEA KELUAR EFEKTIF? (Kasus Minyak Sawit dan Biji Kakao)

Amzul Rifin

PENDAHULUAN

Produk pertanian merupakan salah andalan ekspor Indonesia. Namun pada umumnya komoditas yang diekspor masih dalam bentuk mentah, sehingga memiliki nilai tambah yang relatif kecil. Pemerintah untuk merangsang tumbuhnya industri pengolahan menerapkan kebijakan bea keluar untuk beberapa produk pertanian, di antaranya adalah produk minyak sawit dan biji kakao. Untuk minyak sawit kebijakan tariff telah diterapkan sejak tahun 1994, sedangkan biji kakao diterapkan sejak tahun 2010. Kebijakan bea keluar tersebut bertujuan untuk menjaga pasokan bahan baku dalam negeri untuk kebutuhan industri pengolahan. Namun dampaknya adalah turunnya harga domestik yang merugikan produsen produk tersebut, yang dalam hal ini adalah para petani.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas kebijakan bea keluar tersebut khususnya untuk dua produk yaitu *crude palm oil* (CPO) dan biji kakao. Kedua produk ini dipilih karena kontribusi nilai ekspor relatif tinggi dibandingkan produk lainnya. Efektivitas diukur dengan melihat apakah tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai dan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap para produsennya. Kemudian efektivitas dan dampaknya untuk kedua produk tersebut dibandingkan dan kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari kebijakan bea keluar tersebut.

Secara teori, menurut Reed (2001) dampak bea keluar dapat dibagi menjadi dua yaitu dampak bagi negara kecil, di mana kontribusi ekspor yang kecil terhadap ekspor dunia, dan negara besar yang memiliki

kontribusi ekspor yang besar terhadap ekspor dunia. Pada kasus negara kecil, dengan menerapkan kebijakan bea keluar maka harga domestik akan turun namun tidak akan memengaruhi kurva penawaran ekspor. Sedangkan pada kasus negara besar, penerapan bea keluar akan menggeser kurva penawaran dunia ke kiri atas sehingga menyebabkan harga dunia untuk meningkat dan ekspor dunia akan menurun.

MINYAK KELAPA SAWIT

Pada kasus minyak kelapa sawit, kebijakan bea keluar telah diterapkan sejak tahun 1994¹. Pada saat ini, selain bea keluar produk minyak sawit dikenakan juga tambahan bea keluar yang disebut sebagai Tarif Pungutan Dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 133/PMK.05/2015 yang berlaku sejak Juli 2015. Nilai tarif pungutan ini berkisar antara US\$ 20 sampai 50 per ton. Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Perhitungan bea keluar telah mengalami beberapa kali perubahan dan pada saat ini perhitungan nilai bea keluar minyak sawit berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.010/2016 untuk 30 produk minyak sawit dan turunannya. Perhitungan nilai bea keluar didasarkan atas harga referensi yang ditetapkan tiap bulannya oleh Kementerian Perdagangan. Harga referensi tersebut berdasarkan harga CPO dunia, dengan semakin tinggi harga referensi maka nilai bea keluar per tonnya akan semakin tinggi pula. Pada Tabel 1 dapat dilihat kaitan antara harga referensi dan bea keluar per tonnya untuk produk *crude palm oil* (CPO).

Efektivitas kebijakan bea keluar pada minyak sawit dilihat apakah kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuannya yaitu dengan meningkatkan nilai tambah produk minyak sawit. Efektivitas kebijakan ini dilihat dengan membandingkan nilai ekspor antara *crude palm oil* (CPO), yang mewakili produk minyak sawit yang memiliki nilai tambah yang rendah, dengan *refined palm oil* (RPO) yang memiliki nilai tambah yang lebih besar. Pada tahun 1990, sebelum kebijakan bea keluar diterapkan, perbandingan ekspor CPO dengan RPO adalah 5 banding 1 dan kontribusi ekspor CPO menurun pada tahun 2007 menjadi 48 persen ekspor CPO dan 52 persen ekspor RPO dan pada tahun 2016 ekspor RPO

¹ Untuk melihat perkembangan perhitungan bea keluar minyak sawit dan nilainya dapat dilihat pada Rifin (2010)

mencapai 11 milyar US\$ dan CPO hanya mencapai 3,3 milyar US\$ atau ekspor RPO mencapai tiga kali lipat dari ekspor CPO (*UN Comtrade*, 2017).

Tabel 1. Harga Referensi dan Bea Keluar *Crude Palm Oil* (CPO)

Harga Referensi (US\$/ton)	Bea Keluar (US\$/ton)
< 750	0
750 < X < 800	3
800 < X < 850	18
850 < X < 900	33
900 < X < 950	52
950 < X < 1000	74
1000 < X < 1050	93
1050 < X < 1100	116
1100 < X < 1150	144
1150 < X < 1200	166
1200 < X < 1250	183
> 1250	200

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.010/2016

Namun penerapan bea keluar pada produk minyak sawit juga berdampak negatif terutama dari sisi daya saing produk CPO. Beberapa peneliti termasuk Hasan *et al* (2001) dan Rifin (2010) menunjukkan bahwa dengan meningkatnya bea keluar maka akan menurunkan daya saing dan pangsa pasar CPO Indonesia. Pengenaan bea keluar juga akan berdampak pada penurunan harga CPO domestik yang berdampak pada penurunan penerimaan yang diterima oleh produsen yang dalam hal ini adalah petani (Obado *et al*, 2009).

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan bea keluar pada produk minyak sawit memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Sebuah kebijakan harus diikuti oleh kebijakan lain yang dapat meminimalisir dampak negatif kebijakan tersebut. Sehingga dampak negatif kebijakan bea keluar pada produsen harus diimbangi oleh kebijakan untuk membantu produsen sehingga dapat menghilangkan dampak negatif tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan daya tawar produsen atau petani sawit. Menurut penelitian Nakajima *et al* (2010), petani sawit di Sumatera Utara mengalami peningkatan daya tawarnya terhadap pembeli setelah terjadi peningkatan jumlah pabrik

kelapa sawit (PKS) di propinsi tersebut sehingga petani sawit dapat memilih menjual tandan buah segar-nya kepada pembeli yang menawarkan harga yang lebih tinggi.

Di sisi lain untuk mengembangkan industri minyak kelapa sawit tidak cukup hanya dengan menghambat keluarnya bahan baku tapi perlu juga dibarengi dengan insentif-insentif bagi investor untuk menanamkan modalnya di industri hilir kelapa sawit. Sedangkan untuk penerimaan yang didapat dari bea keluar tersebut, akan lebih baik jika dikembalikan kepada industri minyak kelapa sawit terutama untuk pengembangan industri hilir dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

BIJI KAKAO

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK.011/2010 telah menetapkan bahwa biji kakao yang akan diekspor akan dikenakan bea keluar. Menurut peraturan tersebut, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dalam negeri. Kebijakan ini berlaku mulai April 2010. Rumus bea keluar biji kakao adalah sebagai berikut :

$$\text{Bea Keluar} = \text{Tarif Bea Keluar} \times \text{Harga Patokan Ekspor} \times \text{Volume} \times \text{Nilai Tukar}$$

Perhitungan tersebut sama dengan perhitungan bea keluar pada minyak kelapa sawit. Tarif bea keluar dan harga patokan ekspor ditentukan tiap bulannya. Tarif bea keluar berdasarkan harga referensi yang ditentukan pada harga internasional (Tabel 2). Harga referensi dan harga patokan ekspor diumumkan tiap akhir bulan oleh Kementerian Perdagangan untuk diterapkan pada bulan berikutnya. Harga referensi menentukan tarif bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK.011/2010 yang menyebutkan bahwa harga referensi yang tinggi akan mengakibatkan tarif bea keluar yang tinggi pula atau progresif (Tabel 2). Harga referensi berdasarkan harga rata-rata internasional pada bulan sebelumnya.

Tabel 2. Penentuan Tarif Bea Keluar Biji Kakao Berdasarkan Harga Referensi

Harga Referensi (US\$)	Tarif (%)
< 2000	0
2000 – 2750	5
2750 – 3500	10
>3500	15

Sumber: Kementerian Keuangan, 2010

Tujuan penerapan bea keluar ini memang bertujuan untuk mendukung industri pengolahan kakao dan terbukti kapasitas produksi pengolahan kakao meningkat dari 130 ribu ton pada tahun 2009 sebelum diterapkannya bea keluar menjadi 268 ribu ton pada tahun 2011 dan pada tahun 2014 menjadi 500 ribu ton. Dengan produksi biji kakao kering pada tahun 2011/2012 sebesar 450 ribu ton, kapasitas pengolahan kakao masih dapat dipasok oleh produksi dalam negeri. Namun dengan berkembangnya kapasitas pabrik pengolahan dikhawatirkan produksi biji kakao dalam negeri tidak dapat memenuhi perkiraan tersebut. Sedangkan di sisi lain peningkatan kapasitas produksi ini pada umumnya terjadi pada industri pengolahan yang sudah ada, walaupun ada satu perusahaan pabrik pengolahan yang buka.

Dari sisi ekspor, penerapan bea keluar berhasil menurunkan volume ekspor biji kakao sebesar 93 persen pada periode 2010 dibandingkan tahun 2016. Di sisi lain, penerapan bea keluar meningkatkan volume ekspor produk olahan kakao antara lain kakao pasta meningkat 4,45 kali lipat, kakao *butter* meningkat 2,34 kali lipat dan kakao bubuk sebesar 2 kali lipat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2016 (*UN Comtrade*, 2017).

Menurut beberapa penelitian, menunjukkan bahwa penerapan bea keluar biji kakao akan menurunkan harga domestik dan ekspor biji kakao (Arsyad *et al*, 2011 dan Syadullah, 2012). Dilihat dari dampak terhadap penurunan harga domestik, Neilson (2013) dan Rifin (2015) menunjukkan bahwa harga biji kakao di tingkat petani relatif tidak berpengaruh dengan penerapan bea keluar. Pihak yang dirugikan dengan penerapan kebijakan tersebut adalah para eksportir dimana terjadi penurunan margin yang diterima oleh eksportir.

Dari sisi produksi, memang masih terdapat peningkatan produksi akan tetapi diprediksi peningkatannya tidak dapat mengikuti peningkatan kapasitas pabrik pengolahan. Sedangkan di lapang ada kecenderungan,

terutama di sentra produksi kakao di Sulawesi, terjadi konversi lahan dari kakao menjadi sawit. Apabila hal ini terus berlangsung, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia harus mengimpor biji kakao, walaupun sekarang juga mengimpor biji kakao terutama yang fermentasi, untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan. Hal ini terbukti bahwa volume impor meningkat 2,45 kali lipat di tahun 2016 jika dibandingkan pada tahun 2010 (*UN Comtrade*, 2017)

PENUTUP

Penerapan bea keluar sudah berjalan efektif yang ditunjukkan oleh tercapainya tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu, (a) mengembangkan industri pengolahan minyak sawit dan kakao, (b) meningkatnya ekspor pengolahan minyak sawit dan kakao serta (d) meningkatnya kapasitas industri pengolahan kakao. Dampak pada petani atas penerapan kebijakan bea keluar pada kedua produk ini berbeda. Pada minyak sawit bea keluar dibebankan kepada produsen/petani sedangkan pada kakao lebih dibebankan pada eksportir dengan menurunnya margin yang diterima.

Dari kedua produk tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan bea keluar harus diikuti oleh kebijakan lain untuk meningkatkan kapasitas industri hilir dan meminimalisir dampak negatif kebijakan bea keluar terhadap produsen. Bagi industri minyak sawit, perlu kebijakan untuk meningkatkan daya tawar produsen/petani sawit sehingga dapat mendapatkan harga yang lebih baik. Pada industri kakao, penerapan bea keluar perlu diikuti oleh kebijakan peningkatan produksi biji kakao untuk mengimbangi peningkatan kapasitas industri pengolahan kakao. Hal ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan baku biji kakao untuk industri pengolahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M., Sinaga, B.M. dan Yusuf, S. 2011. Analisis Dampak Kebijakan Pajak Ekspor dan Subsidi Harga Pupuk terhadap Produksi dan Ekspor Kakao Indonesia Pasca Putaran Uruguay. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol 8(1), pp 63-71.
- Hasan, M.F, Reed, M.R.dan Marchant, M.A. 2001. Effects of an Export Tax on Competitiveness: The Case of the Indonesian Palm Oil Industry. *Journal of Economic Development* Vol 26(2), pp. 77 – 90.
- Nakajima, T., Matsuda, H. dan Rifin, A. 2010. *The Structural Change in the Supply Chain of Oil Palm: A Case of North Sumatra Province, Indonesia*. Dipresentasikan pada International EAAE (European Association of Agricultural Economists)-SYAL Seminar Conference Proceedings.
- Neilson, J., Fauziah, K. dan Meekin, A. 2013. *Effects of An Export Tax on the Farm-gate Price of Indonesian Cocoa Beans*. Dipresentasikan pada Malaysian International Cocoa Conference.
- Obado, J., Syaukat, Y.danSiregar, H. 2009. The Impacts of Export Tax Policy on the Indonesian Crude Palm Oil Industry. *Journal International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS)*, Vol 15(2), pp. 107-119.
- Reed, M. 2001. *International Trade in Agricultural Products*. Pearson Education.
- Rifin, A. 2010. The Effect of Export Tax on Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) Export Competitiveness. *ASEAN Economic Bulletin*, Vol 27(2), pp. 173-184.
- Rifin, A. 2015. The Impact of Export Tax Policy on Cocoa Farmers and Supply Chain. *The International Trade Journal*, Vol 29(1), pp 39-62.
- Syadullah, M. (2012). Dampak Kebijakan Bea Keluar terhadap Ekspor dan Industri Pengolahan Kakao. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol 6(1), pp 53–68.
- United Nations. *Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE)*. Available from URL: <http://unstats.un.org/unsd/comtrade>

